

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015**

**SKRIPSI**

**Oleh  
NAMA: DEWI PURNAMASARI  
NPM: 1310013311003**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
KEWARGANEGARAAN  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2017**

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015**

**SKRIPSI**

**Ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Guna memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd)**

**Oleh  
NAMA: DEWI PURNAMASARI  
NPM: 1310013311003**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
KEWARGANEGARAAN  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2017**



## **PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015**

**Dewi Purnamasari<sup>1</sup>, Pebriyenni<sup>1</sup>, Nurharmi<sup>1</sup>**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas BungHatta  
E-mail: Purnamadewisari111@yahoo.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan apa saja Peran Komisi Pemilihan Umum dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Instrumen yang digunakan ialah panduan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum mempunyai tiga peran selama proses pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 yaitu: Pertama, Komisi Pemilihan Umum mempunyai peran dalam merencanakan pemilihan namun dalam proses persiapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pihak KPU mengalami kendala dari segi pendanaan karena dana dicairkan oleh pemerintahan bertepatan dengan proses tahapan persiapan sudah dilaksanakan. Kedua Komisi Pemilihan Umum berperan dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan. Pada proses penyelenggaraan ini terdapat beberapa kendala keterbatasan waktu, anggaran, letak geografis dan masalah kurangnya SDM penyelenggara terkait dengan penguasaan metode dan isi sosialisasi. Ketiga Komisi Pemilihan Umum berperan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahap evaluasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur muncul sebuah masalah berupa gugatan dari salah satu pasangan calon yang mengklaim adanya kecurangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KPU Propinsi Sumatera Barat telah berupaya melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

**Kata Kunci: Peran, KPU, Pemilihan Gubernur**

## **THEROLE OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION (KPU) ON GOVERNOR ELECTION WEST SUMATERA 2015**

**Dewi Purnamasari<sup>1</sup>, Pebriyenni<sup>1</sup>, Nurharmi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Pancasila and Citizenship Education Study

Education Department of Social Studys

Faculty of Teacher Training and Education

Bung Hatta University

E-mail: Purnamadewisari111@yahoo.com

### **Abstract**

The researcher use the descriptive instrument, by using the guidance sheet and documentation. The result of this research to showing that General electin commission have 3 kinds of role as long as preparing of process in implementation of governor election west sumatera 2015. That is, first: the general election commission planning the preparation. However in preparation process to organize the governor election and deputy governor. The general election commission experiencing obstacle from funding because the fund of thawed by the government in the same time with the stages process of preparation has been done. Second, the general election commission organize and doing the election on process to this organizer there are time constrains limitations. The geographical budget and the lack of human resources (SDM)with mastery of methods and the content of socialization. Third, the generalelection commission evaluate the organizer of election in governor nd deouty governor election. At th eveluation stageof governor and deputy governor election appears a problem as lawsuit from one of the candidates who claimed the existence of cheating. And the conclusion of this research is the general election commission of west sumatera has attempted doing task and authority in accordance with the constitution.

**Keywords: Therole,General Election Commission, Governor Election**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur Peneliti ucapkan ke hadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015”. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (P.IPS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini Peneliti banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini pula, peneliti mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Ibu Dra. Pebriyenni, M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Peneliti.
2. Bapak Drs. Nurharmi, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi PPKn FKIP Universitas Bung Hatta.
4. Dekan dan Wakil Dekan FKIP Universitas Bung Hatta.

5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi PPKn Jurusan P. IPS FKIP Universitas Bung Hatta.
6. Staf Tata Usaha FKIP Universitas Bung Hatta.
7. Bapak Amnasmien, SH., Ketua KPU Propinsi Sumatera Barat
8. Bapak Firman, SH, M.Si Sekretaris KPU Propinsi Sumatera Barat
9. Kedua orang tua dan saudara yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
10. Rekan-rekan sesama mahasiswa, khususnya angkatan 2013 Program Studi PPKn Jurusan P. IPS FKIP Universitas Bung Hatta.
11. Serta pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terwujud.

Semoga Allah membalas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada Peneliti dengan ridha dan rahmat yang berkah, dan Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua yang membaca.

Padang, Juni 2017  
**Peneliti**

**Dewi Purnamasari**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>BAB IPENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Batasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB I KERANGKA TEORITIS</b> .....	<b>10</b>
2.1 Kajian Teori .....	10
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah.....	10
2.1.1.1 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah....	10
2.1.1.2 Azas-azas Pemilihan Kepala Daerah .....	11
2.1.1.3 Tahap-tahap Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.....	11
2.1.1.3.1 Tahap persiapan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung .....	12
2.1.1.3.2 Tahap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung .....	12
2.1.1.4 Kelebihan dan kelemahan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung .....	13
2.1.1.4.1 Kelebihan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.....	13

2.1.1.4.2	Kelemahan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.....	14
2.1.2	Tinjauan Tentang Komisi Pemilihan Umum.....	14
2.1.2.1	Pengertian Komisi Pemilihan Umum.....	14
2.1.2.2	Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum.....	15
2.1.3	Tinjauan Tentang Partisipasi Politik Masyarakat.....	16
2.1.3.1	Pengertian Partisipasi Politik Masyarakat.....	16
2.1.3.2	Bentuk-bentuk Partisipasi Politik.....	21
2.1.3.3	Tipologi Partisipasi Politik.....	24
2.2	Penelitian yang Relevan.....	25
2.3	KerangkaKonseptual.....	27
2.4	PertanyaanPenelitian.....	28
	<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
3.1	JenisPenelitian.....	31
3.2	LokasiPenelitian.....	31
3.3	Populasi dan Sampel.....	31
3.3.1	Populasi.....	31
3.3.2	Sampel.....	31
3.4	Variabel dan Indikator Variabel.....	32
3.4.1	Variabel.....	32
3.4.1.1	Variabel Terikat.....	32
3.4.1.2	Variabel Bebas.....	32
3.4.2	Indikator Variabel.....	33
3.4.2.1	Indikator Variabel Bebas.....	33
3.4.2.2	Indikator Variabel Terikat.....	33
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5.1	Jenis Data.....	33
3.5.1.1	Data Primer.....	34
3.5.1.2	Data Sekunder.....	34
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7	Instrumen Penelitian.....	34
3.8	Teknik Analisis Data.....	35

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	36
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.1.1.1Keadaan Geografis .....	36
4.1.1.2Jumlah Penduduk .....	39
4.1.2 Peran KPU Pada Tahapan Persiapan Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Guber.....	40
4.1.3 Peran KPU Pada Tahapan Pelaksanaan Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.. ..	47
4.1.4 Peran KPU Pada Tahapan EvaluasiTerhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. ....	56
4.2 Pembahasan.....	58
4.2.1 Deskripsi Peran KPU Pada Tahapan Persiapan Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur .....	58
4.2.2 Deskripsi Peran KPU Pada Tahapan Pelaksanaan Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur .....	60
4.2.3 Deskripsi Peran KPU Pada Tahapan Evaluasii Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur .....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 01: Hasil Rekapitulasi Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 .....	4
Tabel 02: Bentuk-bentuk Partisipasi Politik .....	23
Tabel 03: Jumlah Penduduk Sumatera Barat .....	39



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Kepala Daerah merupakan pranata penting dalam tiap Negara demokrasi, terlebih pada Negara berbentuk Republik seperti Indonesia. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan sebuah jaminan keberlangsungan dalam proses demokrasi. Selain optimisme terhadap perbaikan kualitas kepemimpinan di suatu daerah, momentum pemilihan Kepala Daerah secara langsung juga merupakan proses pembelajaran politik bagi masyarakat.

Dalam Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga dijelaskan tentang Kepala Daerah hal ini terdapat dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) berbunyi “(1) Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah, (2) Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati dan untuk Daerah kota disebut walikota.”

Selanjutnya dalam Undang-Undang RI No 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa:

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Propinsi dan Kabupaten Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada Tahun 2015 merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah. Hal ini diharapkan agar pemimpin daerah dihasilkan merupakan pemimpin yang demokratis, yang langsung bersentuhan dengan aspirasi masyarakat memilihnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan Kepala Daerah beserta wakil Kepala Daerah sangatlah penting bagi suatu daerah, hal ini disebabkan pilkada merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, pilkada juga merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin di daerah dan yang paling penting merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Sebagaimana diketahui, bahwa proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum disingkat menjadi KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk menentukan dan memilih pemimpin yang berkualitas dan demokratis yang nantinya akan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu baik tingkat nasional, propinsi, atau kabupaten/kota di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015

Tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 1 ayat 7 yang dimaksud dengan “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat dengan KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.Kemudian dalam Pasal 11 Undang-Undang RI No 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota hal ini terdapat Tugas dan Wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sumatera Barat merupakan salah satu Propinsi di Indonesia yang ikut melaksanakan pemilihan Gubernur pada tanggal 9 Desember 2015. Dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat di temukannya kendala- kendala dalam proses pelaksanaan pemilihan. Kendala-kendala ini dihadapi oleh pihak KPU sebagai pihak penyelenggara pemilihan umum. Proses politik yang diharapkan mendapatkan dukungan partisipasi yang tinggi malah kenyataannya rendah, oleh pihak KPU didapatkan data daftar pemilih tetap dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat yakni sebanyak 3,489,743 orang. Namun, setelah dilaksanakannya pemilihan Gubernur Sumatera Barat terlihat dari hasil rekapitulasi suara bahwa yang ikut berpartisipasi hanya sebesar 59,58% dari total daftar pemilih tetap atau

sebanyak 2,079,063 orang yang mana pilkada ini dimenangkan oleh pasang no urut 2 yaitu Irwan Prayitno-Nasrul Abit.

Data selengkapnya tentang hasil rekapitulasi suara pemilihan Gubernur Sumatera Barat bisa dilihat pada tabel 01.

Tabel 01: Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015

No	Kab/Kota	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (Dpt)	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	Presentase Pengguna Hak Pilih	Presentase Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Agam	331,785	183,128	148,657	55.19%	44.81%
2	Dharmas Raya	133,502	99,752	33,750	74.2%	25.28%
3	Kep Mentawai	54,231	34,719	19,512	64,02%	35.98%
4	Kota Bukit Tinggi	72,450	43,843	28,607	60.51%	39.49%
5	Kota Padang	548,213	290,189	258,024	52.93%	47.07%
6	Kota Padang Panjang	35,751	16,765	18,986	46.89%	53.11%
7	Kota Pariaman	59,057	31,636	27,427	53.56%	46.44%
8	Kota Payakumbuh	86,733	44,922	41,811	51.79%	48.21%
9	Kota Sawahlunto	43,248	23,057	20,191	53.31%	46.69%
10	Kota Solok	44,650	32,469	12,181	72.72%	27.28%
11	Lima Puluh Kota	262,738	161,250	101,488	61.37%	38.63%
12	Padang Pariaman	275,845	150,546	125,299	54.58%	45.42%
13	Pasaman	186,760	133,082	53,678	71.26%	28.74%
14	Pasaman Barat	248,154	160,578	87,576	64.71%	35.29%
15	Pesisir Selatan	310,548	203,221	107,327	65.44%	34.566%
16	Sijunjung	147,946	88,007	59,939	59.49%	40.51%
17	Solok	271,474	155,897	115,577	57.43%	42.57%
18	Solok Selatan	110,151	76,918	33,233	69.83%	30.17%
19	Tanah Datar	266,507	149,090	117,417	55.94%	44.06%
	Total	3,489,743	2,079,063	1,410,680	59.58%	40.42%

Sumber: KPU Propinsi Sumatera Barat

Data dari tabel 01 terlihat bahwa masyarakat Sumatera Barat yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah sebesar 40,42%. Dengan ditemukannya angka golput sebesar 40,42% menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Sumatera Barat dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 tergolong rendah.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat menjadi suatu permasalahan yang ditemukan dalam proses pelaksanaan pemilihan Gubernur di Propinsi Sumatera Barat. Dengan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur terpilih. Hal ini dikarenakan Gubernur terpilih belumlah memiliki legitimasi yang kuat sehingga dapat menghambatnya dalam mengambil suatu kebijakan. Permasalahan yang ditemukan ini tentunya haruslah dicarikan solusi agar kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang golput dalam proses pelaksanaan pilkada di Sumatera Barat dan Gubernur terpilih dapat mempunyai legitimasi yang kuat dari hasil pemilihan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Surya Candra selaku masyarakat di Limau Manis Kecamatan Pauh Padang pada hari Rabu 8 Februari 2017 pukul 16.30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

Dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat pada Tahun 2015 saya lihat masyarakat kurang berpartisipasi contohnya saja saya, lebih baik saya kesawah dari pada pergi TPS karena buang-buang waktu saja, tidak ada manfaatnya pergi TPS. Kandidat yang akan terpilih nantinya mana ingat sama masyarakat seperti kita ini, pada waktu itu sosialisasi yang diberikan oleh KPU kepada masyarakat kurang, saya hanya tau tanggal pemilihan saja dan kami pun tidak diberikan sosialisasi politik juga pendidikan politik.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Bapak M. Yusuf selaku Ketua PPK Kecamatan Pauh Kota Padang pada hari Rabu 8 Februari 2017 pukul 19.30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

Dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 masyarakat kurang berpartisipasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat rendah diantaranya: masyarakat lebih berpendapat tidak ada manfaatnya pergi ke TPS untuk melakukan pemilihan, kurangnya

sosialisasi yang diberikan oleh KPU sebagai pihak penyelenggara kepada masyarakat terutama memberikan bimbingan kepada masyarakat faktor penyebabnya adalah masyarakat yang tak memperdulikan lagi sosialisasi yang diberikan oleh pihak KPU.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara Bapak Yon Kenedi selaku pihak pengawas dalam pemilihan Kecamatan Pauh pada hari Jumat 10 Februari 2017 Pukul 14.20 WIB, beliau mengatakan bahwa:

Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh KPU kepada masyarakat disebabkan oleh manifestasi masyarakat yang tidak bersimpatik kepada pemilu tindakan administratif yang diambil berupa memberikan peringatan untuk merekomendasikan dan memerintahkan kepada KPU beserta jajarannya agar meningkatkan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat agar nantinya partisipasi masyarakat lebih meningkat.

Jadi hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: minimnya pendidikan politik dalam lingkungan masyarakat, sikap politik masyarakat, kesadaran politik masyarakat yang rendah serta kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak KPU sebagai penyelenggara pemilihan. Sanksi administratif belum diberikan namun bagi anggota KPU yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pemilihan Gubernur Tahun 2015 sudah diberikan peringatan. Realitas dan fenomena tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan, karena secara tidak langsung kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak KPU beserta jajarannya dan sanksi administratif yang diberikan dapat mempengaruhi partisipasi dari masyarakat dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.

Atas dasar itulah peneliti melakukan penelitian dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Minimnya pendidikan politik dalam lingkungan masyarakat
2. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam pemilihan
3. Kesadaran politik masyarakat yang masih kurang
4. Kurangnya sosialisasi yang diberikan KPU kepada masyarakat
5. Pemberian sanksi administratif kepada anggota KPU yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan prosedur

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas sesuai dengan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

Kurang maksimalnya KPU dalam menjalankan peranannya dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran KPU pada tahapan persiapan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat?

2. Bagaimana peran KPU pada tahapan pelaksanaan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat?
3. Bagaimana peran KPU pada tahapan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya, penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran KPU pada tahapan persiapan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat?
2. Untuk mendeskripsikan peran KPU pada tahapan pelaksanaan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat?
3. Untuk mendeskripsikan peran KPU pada tahapan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat?

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan



- b. Sebagai sarana referensi bagi kalangan pemerintahan khususnya masyarakat luas pada umumnya
- c. Sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah Sumatera Barat, penelitian ini dapat dijadikan sebuah gambaran Tentang Peran Komisi Pemilihan Umum dalam memaksimalkan peranannya pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa menjadi sebuah pengetahuan untuk mengetahui apa saja peran yang dilakukan oleh KPU. Dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.